BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran wajib kepada negara, bersifat wajib secara hukum tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perkembangan jumlah tunggakan pajak yang dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang cukup besar, jumlah yang meningkat tersebut tidak seimbang dengan jumlah penerimaan penagihan pajaknya, maka diperlukan tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.

Hanya penagihan pajak yang efektif yang diperlukan untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Dalam hal mematuhi undang-undang perpajakan yang ada, tidak semua wajib pajak mematuhi aturan ini, terutama dalam hal penagihan pajak. Optimalisasi penerimaan pajak masih menghadapi berbagai kendala, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik dari penghindaran pajak dari masyarakat karena masyarakat merasa rugi jika membayar pajak, ataupun ketidakmampuan masyarakat dalam membayar utang pajaknya.

Penagihan pajak dengan surat paksa memiliki kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Menurut UU RI Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12), Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Jumlah tagihan pajak yang tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran sesuai yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) ditagih menggunakan Surat Paksa. Dasar penagihan pajak yaitu saat diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Keputusan Pembetulan (SK Pembetulan), Surat Keputusan Keberatan (SK Keberatan), dan Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat mulai berdiri pada tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-195/PJ.2008 Tanggal 27 November 2008. KPP Pratama Mataram Barat merupakan pecahan dari KPP Mataram yang dipecah menjadi tiga unit satuan kerja yaitu KPP Pratama Mataram Barat, KPP Pratama Mataram Timur, dan KPP Pratama Praya.

Melaksanakan kegiatan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa, KPP Pratama Mataram Barat harus memperhatikan prinsip efektivitas yang berarti hasil pencapaian dari kegiatan penagihan tersebut harus sesuai dengan

target yang telah ditetapkan. Hal ini penting karena penagihan pajak yang efektif sangat penting untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal.

Berikut ini adalah jumlah target pembayaran surat paksa dan realisasi pembayaran surat paksa pada tahun 2015 dan tahun 2016

Tahun	Target pembayaran	Realisasi pembayaran	Efektivitas	Kriteria
2015	7.548.707.938,00	4.013.040.723,00	53%	Tidak Efektif
2016	6.091.108.504,00	3.713.027.538,00	61%	Kurang Efektif

Jika dilihat dari tahun 2015 dan tahun 2016 jumlah target pembayaran dan realisasi pembayaran surat paksa mengalami penurunan. Tetapi jika dilihat dari segi efektivitasnya, jumlah persentasenya meningkat dari tidak efektif sebesar 53% menjadi kurang efektif yaitu 61%. Nilai tersebut dihitung dari nominal realisasi pembayaran dibagi dengan target pembayaran dikali dengan 100%.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh R.F.Mamusu dan I.Elim. tahun 2017 yang berjudul Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Dengan Menggunakan Surat Teguran Dan Surat Paksa Di KPP Pratama Kabupaten Poso. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Kabupaten Poso. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis tidak menggunakan surat teguran, dan lebih memfokuskan pada surat paksa. Selain itu lokasi dan objek penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan deskriptif kuantitatif.

Atas dasar tersebut, Penulis ingin mengangkat penelitian mengenai **“Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penerbitan Surat Paksa efektif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?
2. Bagaimana kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?
3. Apa hambatan yang dialami Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat dalam pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021?

1.3 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data variabel yaitu Pajak Penghasilan muali tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dan penelitian ini dibatasi hanya dengan satu Kantor Pelayanan Pajak yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Maratam Barat dalam rangka peningkatan penerimaan pajak dalam kurun waktu 2017-2021.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Barat.
3. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi dalam pencairan tunggakan pajak dengan Surat Paksa di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan pertimbangan di kantor pajak dalam hal penagihan pajak dengan surat paksa, dalam hal ini efektivitas dari penagihan pajak dengan surat paksa.
2. Sebagai bahan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Mataram Barat.
3. Sebagai salah satu persyaratan akademis untuk menyelesaikan studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi SBI Yogyakarta.

1.6 Sistematika Penelitian

Penulis membagi pembahasan ini dalam lima bab untuk memudahkan pembahasan, diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang, masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian secara ringkas.

BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian pajak, dasar penagihan pajak, penagihan pajak, hak dan kewajiban wajib pajak, penagihan pajak berdasarkan surat paksa, dan pengertian efektifitas.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, metode analisis.

BAB IV DATA DAN ANALISIS

Penulis akan mencoba menganalisa data penagihan pajak yang berkaitan dengan surat paksa terhadap penagihan pajak serta melakukan pembahasan dari analisa yang dibuat.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Terdiri dari kesimpulan dan saran